KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Recovery Bencana Tsunami : Banten Siapkan 17,8 Ha untuk Hunian Tetap
Tanggal : Jumat, 25 Januari 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 11

RECOVERY BENCANA TSUNAMI

Banten Siapkan 17,8 Ha untuk Hunian Tetap

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda seluas 17,89 hektare (Ha). Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Tim Pengawan Penanganan Bencana DPR RI, kemarin.

Muhtarom menjelaskan, penyediaan lahan itu berlokasi di Kabupaten Pandeglang tersebar di enam titik. Dari tanah seluas itu akan dibangun 717 rumah hunian tetap yang dilaksanakan Pemprov Banten dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, proses *recovery* juga akan dilakukan terhadap 324 unit rumah rusak ringan dan sedang.

Menurut Muhtarom, ketika bencana tsunami Selat Sunda menghantam Provinsi Banten beberapa waktu lalu, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat menangani bencana. Dalam tempo tidak terlalu lama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menurunkan alat-alat berat untuk membuka akses lokasi bencana.

> *Apabila pemerintah daerah merasa kekurangan biaya, segera ajukan proposal bantuan pada pemerintah pusat.*
>
> FAHRI HAMZAH
> Wakil Ketua DPR RI

Berbarengan dengan itu, tim kesehatan dan tim evakuasi langsung melakukan pertolongan kepada para korban. Tindakan ini disusul kemudian oleh bantuan logistik ke lokasi bencana. Selanjutnya didirikan posko-posko bantuan dan dapur umum. "Saat ini juga, terus dilakukan upaya *trauma healing* bagi korban selamat," kata Muhtarom.

Muhtarom mengatakan, Pemprov Banten juga memberikan pengobatan gratis kepada seluruh korban tsunami Selat Sunda. Sampai saat ini Pemprov Banten sudah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp1,5 miliar untuk biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawasan Penanganan Bencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon ini melakukan pembahasan penanganan bencana Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Banten, dan Lampung. Pembahasan penanganan bencana dilakukan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, BNPB, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov Lampung, Pemprov NTB, dan Pemprov Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah bergerak lebih cepat untuk penanganan pascabencana. "Apabila pemerintah daerah merasa kekurangan biaya, segera ajukan proposal bantuan pada pemerintah pusat," kata Fahri.

Diketahui, Provinsi Banten mengalami bencana akibat tsunami Selat Sunda pada akhir tahun lalu. Akibat bencana tersebut, sebanyak 317 orang meninggal dunia, 757 orang luka-luka, dan tiga orang hilang. Sementara kerugian material mencapai 1.091 rumah rusak, 108 kendaraan roda empat, 95 kendaraan roda dua, 102 perahu, serta 37 hotel dan vila rusak.

teguh mahardika